



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
OPD : DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, hal ini merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi, selain itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Purbalingga. Laporan ini diharapkan pula dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga peningkatan kinerja lebih baik lagi.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun disadari tidak ada yang sempurna oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikannya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga dan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Purbalingga, Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA.



RADITYA WIDAYAKA. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19750619 199501 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Masalah.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan.....	5
1. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021.....	5
B. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	12
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini..	13
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir....	16
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.....	19
4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilaksanakan.....	21
5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.....	24
B. Realisasi Anggaran.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.0 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	8
Tabel 2.1 Perjanjian Kierja Tahun 2021.....	10
Tabel 3.0. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	13
Tabel 3.1.Capaian Kinerja Cakupan Keluarga Sejahtera.....	14
Tabel 3.2.Pendataan Keluarga	16
Tabel 3.3.Capaian Kinerja Prosentase PMKS Yang Terlayani.....	17
Tabel 3.4.Jumlah rincian PMKS yang terlayani di kabupaten purbalingga tahun 2019.....	17
Tabel. 3.5.Capaian Kinerja TFR.....	23
Tabel.3.6. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak.....	28
Tabel 3.7. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak.....	32
Tabel 3.8. Realsasi Anggaran.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

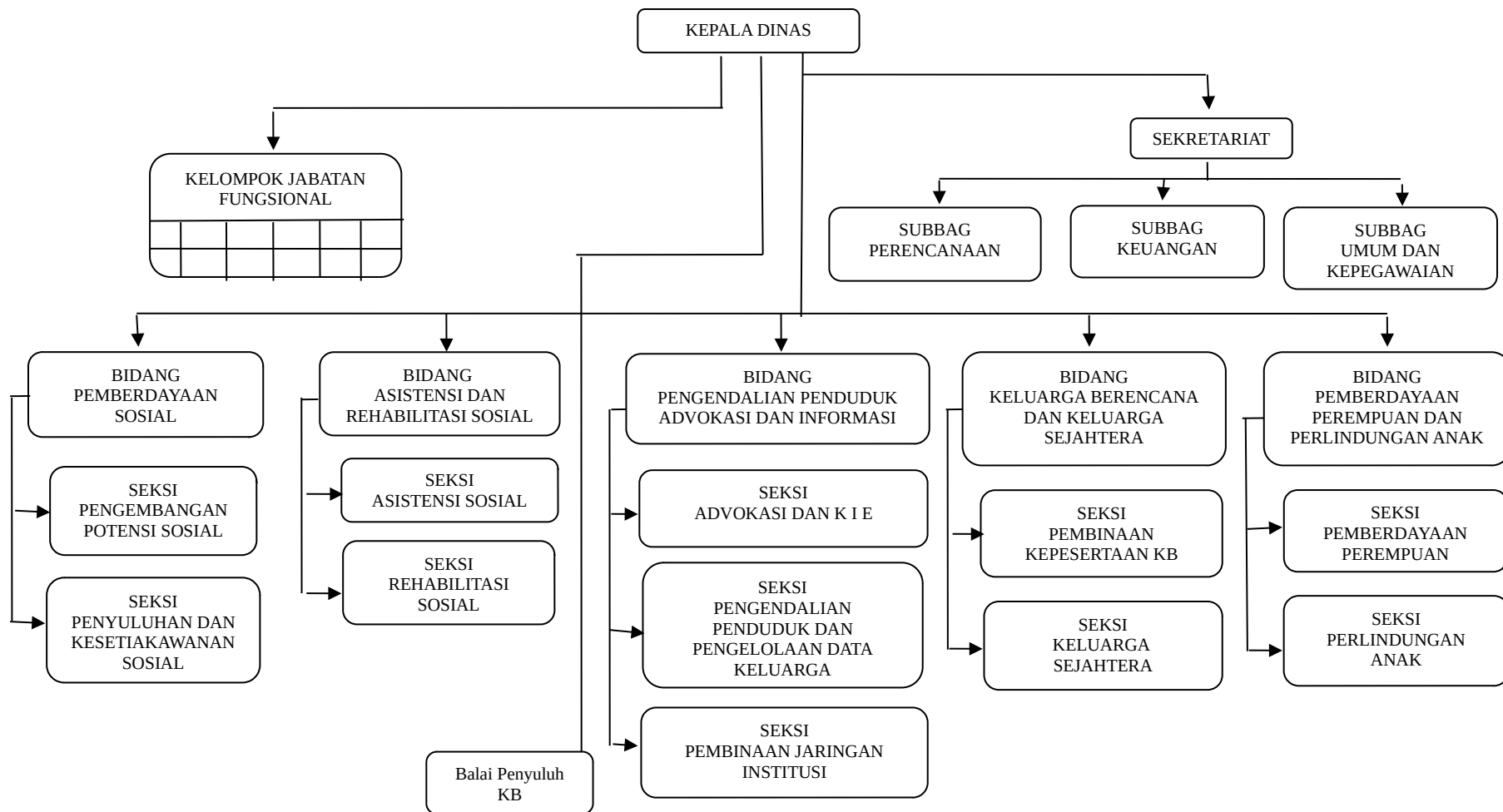
A. Latar Belakang

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSDALDUKKBP3A) Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu OPD yang berperan penting dalam mencapai pembangunan di kabupaten purbalingga. Sesuai dengan Misi kabupaten purbalingga nomor 4, Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. DINSOSDALDUKKBP3A yang memiliki 3 urusan yaitu urusan dalam hal sosial, urusan dalam hal pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam upaya mencapai pembangunan di Kabupaten Purbalingga, DINSOSDALDUKKBP3A menjadi bagian penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui urusan sosial, terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ketiga urusan tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam hal untuk mencapai pembangunan dikabupaten purbalingga melalui misi nomor 4 yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

B. Gambaran Umum Satuan Kerja Pemerintah Daerah

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA**



C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan pembangunan daerah merupakan ”*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam satu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan yang dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksud guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisa gambaran umum selama 5 tahun, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Masih Tingginya PMKS;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program KB;
3. Masih banyaknya keluarga yang masuk dalam katagori KS 1 dan Pra KS;
4. Belum optimalnya pembangunan Gender di Kabupaten Purbalingga;
5. Masih tingginya kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak;
6. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya dalam kurun waktu yang telah di tentukan selama 5 tahunan.

Memperhatikan peraturan daerah kabupaten purbalingga nomor 01 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2005 – 2025 pemerintah telah menetapkan Visi yaitu “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA” yang akan di implementasikan melalui 7 (Tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Menyelenggarakan Pemeritahan yang profesional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam upaya mendukung tercapainya Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Purbalingga, keterkaitan DINSOSDALDUKKBP3A dalam melaksanakan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2016 – 2021, yaitu:

1. Melaksanakan Misi ke 4, yaitu : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
Melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Program Perlindungan anak dan Asistensi dan Rehabilitasi Sosial dalam upaya menciptakan penduduk tumbuh seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga dan penanggulangan masalah masalah sosial.
2. Melaksanakan Misi ke 5, yaitu : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Melalui program Pemberdayaan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Sosial dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan kepedulian sosial masyarakat;

3. Melaksanakan Misi ke 6, yaitu : Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui gerakan masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayahan yang memadai.

Melalui pelaksanaan program Kampung KB dan program Pemberdayaan Sosial dalam rangka untuk pemerataan hasil program kependudukan KB dan pembangunan keluarga dan meningkatkan kegotongroyongan dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

Misi tersebut merupakan acuan DINSOSDALDUKKBP3A untuk membangun kabupaten purbalingga. Secara umum DINSOSDALDUKKBP3A berkontribusi terhadap seluruh misi dan visi dalam perencanaannya, namun indikator misi ke 3, 4 dan 5 ini merupakan indikator kinerja utama yang berkaitan langsung dan harus di capai. Dalam keterkaitan hal tersebut makan DINSOSDALDUKKBP3A dengan menggunakan tugas, pokok dan fungsi untuk merumuskan Visi dan Misi yang ingin dicapai satu samai dengan lima tahun secara berkesinambungan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Bupati Kabupaten Purbalingga) atas kinerja terukur tentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disusun dengan memperhatikan review rencana strategis tahun 2020 dengan berdasarkan pada cascading untuk menentukan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang dianggap memiliki daya ungkit tinggi dalam meningkatkan performa kinerja DINSOSDALDUKKBP3A sehingga kedepannya indikator sasaran tersebut akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala DINSOSDALDUKKBP3A dengan Bupati Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung IKU Bupati yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi DINSOSDALDUKKBP3A.

Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang terlayani	Persen	72 %
2	Meningkatnya kepesertaan dan partisipasi Keluarga Berencana	TFR	Persen	2.13 %
3	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindakkekerasan	Indek Pemberdayaan Gender	Persen	70.61 %
		Nilai Prdikat Kabupaten Layak Anak	Nilai	510

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.997.190.000	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1.976.970.000	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 2.818.310.000	APBD
4	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Rp. 2.726.989.624	APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp. 64.535.000	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 189.400.000	APBD
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 537.934.000	APBD & DAK

No.	Program	Anggaran	Keterangan
-----	---------	----------	------------

8	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	151.843.000	APBD & DAK
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	39.720.000	APBD
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	87.723.000	APBD & DAK
11	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	345.990.000	APBD
12	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	89.250.000	APBD
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	7.689.739.000	APBD & DAK
14	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahterqa (KS)	Rp.	50.858.000	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam Mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi.

Dalam Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemerintah kabupaten purbalingga khususnya DINSOSDALDUKKBP3A melalui Misi ke 4 yaitu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Renstra Strategis DINOSDALDUKKBP3A Tahun 2016 – 2021 memiliki Tujuan yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan Indikator Tujuan yaitu Cakupan Keluarga Sejahtera. Dalam indikator tujuan tersebut, tentunya untuk mencapai Cakupan Keluarga Sejahtera harus di dukung dengan adanya Sasaran Strategis serta Indikator Sasaran yang mendukung tercapainya Indikator Tujuan yang ada pada Renstra DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga. Adapun Sasaran Startegis dan Indikator Sasaran yang ada pada Renstra DINSOSDALDUKKBP3A adalah Sebagai Berikut.

- 1) Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan Indikator Kinerja Prosentase PMKS yang terlayani;
- 2) Sasaran Strategis Meningkatnya Kepesertaan dan Partisipasi Keluarga Berencana dengan Indikator Kinerja TFR;
- 3) Sasaran Strategis Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak yang memiliki dua Indikator kinerja yaitu :
 - a. Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)
 - b. Nilai Kabupaten layak Anak.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Cakupan Keluarga Sejahtera	%	80	80	100
	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Prosentase PMKS yang terlayani	Persen	70	77.09	110.12
	Meningkatnya partisipasi KB	TFR	Persen	2.05	2.05	2.05

	Tertangani permasalahan perempuan dan anak	IDG	Persen	75.52	70.61	70.61
		Nilai Kabuapten / Kota Layak Anak	Nilai	510	374.8	73.49

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Keluarga sejahtera adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan itulah dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. Keluarga Sejahtera terdiri dari 4 tahapan keluarga atau 4 indikator, yaitu : Keluarga Sejahtera Tahap I atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs), Keluarga Sejahtera Tahap II atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs), Keluarga Sejahtera Tahap III atau indikator “kebutuhan pengembangan” (develomental needs), dan Keluarga Sejahtera Tahap III Plus atau indikator “aktualisasi diri” (self esteem).

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Cakupan Keluarga Sejahtera

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %	Target 2021
Cakupan Keluarga Sejahtera	%	76.05	78.01	80.29	80.57	80	83.02	103.77	80.1

Pada tahun 2020 berdasarkan hasil pendataan keluarga sebanyak 309.273 keluarga. Dari pendataan tersebut, jumlah keluarga sejahtera berjumlah 256.777

keluarga atau 83.02% dari jumlah keluarga seluruhnya. Capaian tersebut meningkat bila dibandingkan dengan realisasi pada setiap tahunnya. Data pencapaian Tahapan Keluarga Sejahtera hasil Pendataan Tahun 2020 adalah jumlah keluarga yang di data pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga sebanyak 309.273 keluarga, dengan menggunakan 21 indikator keluarga sejahtera yang dibedakan menjadi 5 tahapan yaitu :

1. Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 524.96 keluarga atau 16.96 % dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga;
2. Keluarga Sejahtera Tahap I sebanyak 65.149 keluarga atau 21.06 % dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga;
3. Keluarga Sejahtera Tahap II sebanyak 90.339 keluarga atau 29.22 % dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga;
4. Keluarga Sejahtera Tahap III sebanyak 96.829 keluarga atau 31.30 % dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga;
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus sebanyak 4.400 keluarga atau 1.42 % dari jumlah keluarga yang ada, yaitu 309.273 keluarga.

Tabel 3.2. Data Keluarga Tahun 2020

No.	Kecamatan	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I	Keluarga Sejahtera II	Keluarga Sejahtera III	Keluarga Sejahtera III Plus	Keluarga Sejahtera (KS I + KS II + KS III + KS III Plus)	JUMLAH
1.	KEMANGKON	2847	4906	4294	7930	413	4906 + 4294 + 7930 + 413	17543
2.	BUKATEJA	4904	4166	6309	7817	620	4166 + 6309 + 7817 + 620	18912
3.	KEJOBONG	4299	2595	4460	5299	61	2595 + 4460 + 5299 + 61	12415
4.	KALIGONDANG	3797	5291	6897	5062	142	5291 + 6897 + 5062 + 142	17392
5.	PURBALINGGA	878	1899	3623	10606	547	1899 + 3623 + 10606 + 547	16675
6.	KALIMANAH	1414	3385	7234	5886	173	3385 + 7234 + 5886 + 173	16678
7.	KUTASARI	3287	7753	6255	2587	53	7753 + 6255 + 2587 + 53	16648
8.	MREBET	4555	4419	6098	9958	115	4419 + 6098 + 9958 + 115	20590
9.	BOBOTSARI	2998	3421	4436	5634	367	3421 + 4436 + 5634 + 367	13858
10.	KARANGREJA	2074	3316	2957	5727	158	3316 + 2957 + 5727 + 158	12158
11.	KARANGANYAR	2403	2601	3911	3406	276	2601 + 3911 + 3406 + 276	10194
12.	KARANGMONCOL	3207	4654	5280	3647	315	4654 + 5280 + 3647 + 315	13896
13.	REMBANG	5057	4088	5174	5456	377	4088 + 5174 + 5456 + 377	15095
14.	BOJONGSARI	2431	3807	6220	6408	202	3807 + 6220 + 6408 + 202	16637
15.	PADAMARA	1100	2940	6407	3013	452	2940 + 6407 + 3013 + 452	12812
16.	PENGADEGAN	3406	1813	2484	5431	68	1813 + 2484 + 5431 + 68	9796
17.	KARANGJAMBU	2707	911	3757	666	5	911 + 3757 + 666 + 5	5339
18.	KERTANEGARA	1132	3184	4603	2296	56	3184 + 4603 + 2296 + 56	10139
J U M L A H		52496	65149	90399	96829	4400	256.777	256.777

SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KESEJATERAAN SOSIAL

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan stratgis perangkat daerah maka di susunlah pembanding antara target dan realisasi kinerja pada tahun lalu dan beberapa tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Prosentase PMKS Yang Terlayani

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021
Prosentase PMKS yang terlayani	Persen	85.58	75.96	70	77.09	110.12	72

Melalui Urusan Sosial, Indikator kinerja PMKS yang terlayani, Angka penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Purbalingga yang terlayani pada tahun 2018 sebesar 85.58%, dan pada tahun 2019 realisasi sebesar 75.96% sehingga bila dibandingkan antara ralisasi pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan sebesar 9.62%. Pada tahun 2020 sebesar target 80%. Pada tahun 2020, jumlah PMKS yang terdata sebanyak 149.480 orang. sedangkan yang sudah tertangani sebanyak 115.234 orang atau sudah 77.09 % sudah tertangani. Apabila dibandingkan PMKS yang terlayani pada tahun 2019 sebesar 75.96% dan tahun 2020 sebesar 77.09%. Sehingga apabila dibandingkan antara realisasi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.13 %.

PMKS yang terlayani pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Jumlah rincian PMKS yang terlayani di kabupaten
purbalingga tahun 2020

No.	Jenis PMKS	Yang Seharusnya Menerima Bantuan	Yang Diberikan Bantuan				Yang Belum Menerima Bantuan
			APBD II	APBD I	APBN	Jumlah	
1.	Anak Balita Terlantar (ABT)	17	17	-	-	17	-
2.	Anak Terlantar	16	1	-	15	16	-
3.	Anak yang mengalami Masalah Hukum (AMH)	75	47	-	-	47	28
4.	Anak Jalanan (AJ)	40	40	-	-	40	0
5.	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)						
	a. Anak Dengan Disabilitas Fisik						
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	284	16	-	-	16	268
	b.2. Mata Tuna Netra (TN)	26	-	-	-	-	26
	a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	177	2	-	-	2	175
	b. Disabilitas Mental						
	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	181	-	-	-	-	181
	b.2. Mental Exs Psikotik (Tuna Laras)	6	-	-	-	-	6
	c. Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	117	-	-	-	-	117
6.	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	43	-	-	-	-	43
7.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	2	-	-	-	-	2
8.	Lanjut Usia Terlantar	2.038	8			8	2030
9.	Penyandang Disabilitas						
	a. Penyandang Disabilitas Fisik						
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	1.952	265	-	-	265	1.687
	a.2. Mata Tuna Netra (TN)	1.028	41	-	-	41	987
	a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	2.044	12	-	-	12	2.032
	b. Penyandang Disabilitas Mental						
	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	1.430	4	-	-	4	1.426
	b.2. Mental Exs Psikotik (Tuna Laras)	713	29	-	-	29	684
	c. Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	560	280	-	-	280	280
10.	Tuna Susila (TS)	1	-	-	-	-	1
11.	Gelandangan	9	9	-	-	9	-
12.	Pengemis	8	6	-	-	6	2

13.	Pemulung	25	-	-	-	-	25
14.	Kelompok Minoritas/Waria	-	-	-	-	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (LP)	28	-	-	-	-	28
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4	-	-	-	-	4
17.	Korban Penyalahgunaan Napza	75	-	-	75	75	-
18.	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	59	-	-	-	-	59
20.	Pekerja Migran Bermasalah	-	-	-	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	1.492	-	-	1.376	1.376	116
22.	Korban Bencana Sosial	130	-	-	130	130	-
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.440	-	-	600	600	840
24.	Fakir Miskin	133.816	-	-	112.261	112.261	21.555
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.644	-	-	-	-	1.644
26.	Komoditas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		149.480	777	-	114.457	115.234	34.346

Dari data diatas, jumlah PMKS yang ada sebanyak 149.480 PMKS, yang telah ditangani yaitu 115.234 PMKS, dan yang belum ditangani yaitu 34.246 PMKS. Dari persentase tingkat pencapaian kinerja dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat tidak bersifat pelayanan natural saja. Selain pelayanan yang bersifat natural juga dilakukan bantuan yang bersifat konsultatif ataupun koordinatif yang bersifat persuasif dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun kelembagaan sosial lainnya.

Dari persentase tingkat pencapaian kinerja dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial yang telah diberikan kepada publik atau masyarakat tidak bersifat pelayanan natural saja. Selain pelayanan yang bersifat natural juga dilakukan bantuan yang bersifat konsultatif ataupun koordinatif yang bersifat persuasif dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun kelembagaan sosial lainnya.

Kendala yang dihadapi:

Permasalahan Pelayanan Urusan Sosial di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Data PMKS selalu berubah setiap saat, hal ini terjadi karena beberapa alasan antarlain kurangnya koordinasi dengan petugas di tingkat kecamatan dan desa untuk selalu mengupdate data PMKS yang ada, sehingga untuk mendorong keberhasilan Penanganan PMKS di kabupaten purbalingga perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

1. Data PMKS selalu berubah setiap saat;
2. Motivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan keterampilan masih menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi untuk mengharapkan imbalan;
3. Masih sulitnya PMKS khususnya anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi pada lembaga sosial yang telah disediakan oleh pemerintah dengan alasan masih ingin berfikiran bebas walaupun ada dari beberapa dari mereka yang mau untuk direhabilitasi. Hambatan lainnya juga muncul dari keluarga anak drop out, anak nakal, dan anak jalanan yang kurang peduli untuk ikut memotivasi anak mereka dengan alasan sudah tidak bisa memotivasi mereka. Selain itu ada juga alasan keluarga yang merasa berat hati untuk merehabilitasi anak mereka baik yang bermasalah difabel ataupun drop out. Keluarganya merasa tidak tega untuk anaknya direhabilitasi sehingga ada juga dari pihak anak mau untuk direhabilitasi tetapi keluarga tidak setuju;
4. Dunia usaha yang ada belum bisa memberikan lapangan kerja kepada penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan lapangan pekerjaan, dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria pekerja yang ditentukan;
5. Banyak kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagai contoh banyak PMKS yang sebetulnya mampu untuk bekerja dan masih produktif tetapi mereka cenderung pasrah dengan keadaan;
6. Kegiatan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dalam artian kadang penerima manfaat kondisinya sudah bukan kategori PMKS. Permasalahan ini dikarenakan data dari Kementerian Sosial tidak sinkron dengan data yang diperoleh dari lini lapangan yang didapatkan langsung dari pendamping tingkat Kecamatan TKSK;

7. Untuk pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) masih banyak yang menafsirkan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan atau untuk perorangan sehingga yang mendapat bantuan berupa hewan ternak merasa ingin memelihara dan memiliki secara perorangan. Dari pengertian tersebut menyebabkan program ini sulit untuk berkembang;
8. Belum adanya bantuan sarana transportasi bagi Karang Taruna guna memfasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna. Selain itu kurangnya penguatan di tingkat kecamatan se Kabupaten Purbalingga dikarenakan tidak adanya tanggapan di tingkat kecamatan sebagai komunikator Karang Taruna tingkat Desa;

Upaya yang dilaksanakan:

- a. Koordinasi dengan petugas di tingkat Kecamatan dan Desa untuk selalu update data PMKS yang ada;
- b. Dalam Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu pendekatan langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pendekatan langsung (*direct*) yaitu dalam pendekatan PMKS kita langsung menemui orangnya dengan memberikan motivasi untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan sehingga tumbuh *responsive* sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan. Pendekatan tidak langsung (*indirect*) yaitu dalam pendekatan PMKS dilakukan secara tidak langsung atau melalui pihak ketiga, baik melalui tokoh masyarakat, melalui desa, atau lembaga lain yang dipandang perlu;
- c. Selalu melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ataupun balai rehabilitasi yang telah disediakan oleh Pemerintah, dengan melakukan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan pemantapan kecepatan dalam pemecahan masalah sehingga PMKS yakin bahwa mereka siap untuk ditolong dan tidak menimbulkan keraguan dengan menggunakan sarana yang ada;
- d. Pendamping tingkat Kecamatan TKSK harus setiap saat siap data yang diperlukan untuk penanganan PMKS;
- e. Sebelum melaksanakan pemberian bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebaiknya di survey ulang agar tepat sasaran;

- f. Pendamping Keluarga Harapan (PKH) harus mendampingi seluruh keluarga penerima manfaat disaat penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- g. Melakukan pendekatan kepada penerima manfaat untuk sabar dalam menunggu pencairan bantuan;
- h. Mengusahakan agar tahun berikutnya dapat memberikan bantuan ke seluruh panti sosial dan panti rehabilitasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, yaitu sebanyak 25 panti;
- i. Memberikan pengertian tentang pengkoordinasian Kelompok Usaha Bersama (KUBe) agar bisa diterima dan dilaksanakan oleh anggota kelompok sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan berkembang;
- j. Meningkatkan koordinasi Petugas Sosial Kemasyarakatan (PSM) yang ada di tingkat kecamatan untuk segera dibentuk Paguyuban PSM sebagai Petugas Sosial Kemasyarakatan;
- k. Mengusulkan fasilitas kendaraan untuk memperlancar kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna dalam meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak;
- l. Perlu adanya intensitas kunjungan dengan keluarga atau anak yang berhadapan dengan masalah hukum agar ada keterbukaan, sehingga permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan tertangani;
- m. Mengajukan permohonan bantuan logistik untuk bantuan korban bencana alam maupun korban bencana sosial.

SASARAN 2 :

MENINGKATNYA PARTISIPASI KELUARGA BERENCANA

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan strategis perangkat daerah maka di susunlah perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini.

Tabel 3.5. Capaian Kinerja TFR

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021
TFR	Persen	1.99	2.25	2.05	2.05	100	2.13

Melalui urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan indikator kinerja sasaran TFR (*Total Fertility Rate*)/ angka kelahiran total, pada tahun 2018 realisasi sebesar 1.99 % dan pada tahun 2019 realisasi sebesar 2.25 %. Bila dibandingkan antara realisasi pada tahun 2018 dan 2019 TFR terjadi peningkatan sebesar 0.26 %. Pada tahun 2020 target sebesar 2.05 % dengan realisasi sebesar 2.05%. Sehingga untuk capaian pada tahun 2020 sebesar 100%.

Banyak hal yang mempengaruhi meningkatnya Angka Kelahiran Total / TFR yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi. Tingkat pendapatan dapat diwakili oleh pendapatan perkapita. Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain Pengetahuan penduduk usia remaja tentang penundaan usia perkawinana dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah, Masih banyaknya PUS tidak ingin anak, tidak KB tetapi tidak hamil, Peningkatan MKJP dengan metode kontrasepsi timol terhambat dan Masih rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga, hal ini sering terjadi dikarenakan Masih banyak terjadi pernikahan dini, Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat masih rendah, Banyak PUS suaminya bekerja di luar daerah, Tenaga medis yang terlatih tidak bisa melayani karena menjadi pejabat struktural, Hanya sampai di kegiatan sosialisasi dan pelatihan saja, belum ada bantuan langsung, Sehingga untuk mendorong keberhasilan meningkatnya kepesertaan dan partisipasi keluarga berencana perlu berkomitmen dan dukungan pemerintah, toga dan toma,

adanya sarpras pendidikan yang memadai, Dukungan LSM kepemudaan, Pengetahuan PUS untuk berKB tinggi, keinginan PUS untuk tidak ingin punya anak lagi, Animo akseptor MOW metode timol tinggi serta Menambah anggaran daerah guna memberikan bantuan langsung.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB yaitu terselenggaranya fasilitasi pelayanan total Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Koordinasi pengelola Kampung KB yang disini adalah PKB / PLKB Kecamatan dan Kelompok Kerja Kampung KB yang membahas strategi pendekatan partisipasi masyarakat sekitar. Kegiatan Kampung KB ini juga masih mengalami kendala seperti saat penancangan kami mengundang seluruh pejabat dan stakeholder di Kabupaten Purbalingga, tetapi respon yang didapat kurang bagus. Bahkan dari undangan yang beredar hanya 10 % yang datang, padahal dari kegiatan Kampung KB ini langsung fokus penggerakan peningkatan kualitas masyarakat dari titik paling kecil yaitu tingkat Rukun Warga. Begitu juga partisipasi masyarakatnya masih rendah dan terbatas, sehingga integrasi program KKBPK terhambat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kampung KB. Kampung KB juga membutuhkan warga di wilayah kampung KB untuk memberikan sedikit ruang di rumahnya untuk dijadikan rumah data sebagai informasi dalam perencanaan penggarapan kampung KB. Rumah Data tersebut nantinya akan memuat data Demografi, KB, dan Tahapan Keluarga disamping juga pemetaan, dokumen dan dokumentasi yang menjadi permasalahan di Kampung KB

Kendala yang dihadapi:

Kendala dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)

- a. Pengetahuan petugas/ kader pendata masih belum memahami secara detail indikator data yang diharapkan;
- b. Periode pendataan relatif pendek dan menjelang akhir tahun periode.
- c. Masih kurangnya pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif,
- d. Produktifitas Ekonomi Perempuan di Kabupaten Purbalingga masih minim

Upaya yang dilaksanakan dalam Pemutakhiran Data Keluarga (proses pengambilan data)

1. Pelatihan teknis untuk petugas / kader pendata di tingkat desa / kelurahan (karena selama ini pelatihan teknis hanya di tingkat kecamatan saja);
2. Memajukan dan memperpanjang jadwal kegiatan pendataan.
3. Dilaksanakan pelatihan dalam mengelola produk ekonomi produktif;
4. Permodalan dan sosialisasi perizinan produk.

Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja :

1. Dilaksanakan Pendataan Keluarga guna mengetahui kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang sebenarnya;
2. Dilaksanakan pengembangan cakupan dan kualitas kelompok UPPKS guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam peningkatan ekonomi produktif. Pelaksanaan pelatihan dalam mengelola produk UPPKS dan dibuka pameran produk UPPKS guna sarana promosi produk UPPKS;
3. Dibentuk kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKS) untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak dan remaja dan juga meningkatkan kualitas keluarga lanjut usia;
4. Penyampaian advokasi melalui gerak Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB dengan cara pemutaran film diselingi penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat;
5. Metode penyampaian pesan melalui media radio juga dilakukan, tetapi metode ini kurang efektif karena hanya berupa pesan searah sehingga kurang mendapat tanggapan pendengar radio;
6. Pembentukan kelompok Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK - R). Kelompok ini berfungsi untuk sarana sosialisasi dan konseling bagi remaja dalam meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja. Karena dengan meningkatkan pengetahuan reproduksi remaja dapat mencegah atau mengurangi angka pernikahan dini yang terjadi. Karena tingkat kematangan usia perkawinan berpengaruh pada kualitas keluarga. Kelompok ini juga melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe) di sekolah – sekolah yang tujuannya untuk memotivasi siswa siswi lebih merencanakan masa depannya;
7. Program Kampung KB yang sasarannya adalah Rukun Warga tertinggal / *ranking class* nya lebih rendah dari Rukun Warga lainnya di 18 Kecamatan Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun 2018 sudah dicanangkan 36 Kampung KB

untuk seluruh Kabupaten Purbalingga. 36 Kampung KB yang sudah dicanangkan sebagai berikut:

- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Bajong Rw. 05;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Talagening Rw. 11;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Bumisari Rw. 12;
- Kampung KB Kecamatan Kemangkong, Desa Jetis Rw. 03;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Wirasaba Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kejobong, Desa Langgar Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Brecek Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Purbalingga, Desa Toyareja Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Kalimanah, Desa Karangasari Rw. 05;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Karangcegak Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Karangnangka Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Palumbungan Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangreja, Desa Gondang Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karanganyar, Desa Brakas Rw. 02;
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Baleraksa Rw. 09;
- Kampung KB Kecamatan Rembang, Desa Bantarbarang Rw. 08;
- Kampung KB Kecamatan Bojongsari, Desa Pekalongan Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Mipiran Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Pengadegan, Desa Pasunggingan Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan Karangjambu, Desa Sirandu Rw. 04;
- Kampung KB Kecamatan Kertanegara, Desa Kasih Rw. 01;
- Kampung KB Kecamatan kertanegara, Desa Langkap Rw 03 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bukateja, Desa Karanggedang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Bobotsari, Desa Tlagayasa Rw 07 dengan katerangan desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan pengadegan, Desa Pengadegan Rw 05 dengan keterangan desa tertinggal;

- Kampung KB Kecamatan Padamara, Desa Kalitinggar kidul Rw 01 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan karangreja, Desa Tlahab Kidul Rw 04 dengan keterangan desa tertinggal;
- Kampung KB Kecamatan Kutasari, Desa Candinata Rw 03 dengan keterangan desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kemangkon, Desa plumutan Rw 05 dengan keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Sempor Lor Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Kaligondang, Desa Cilapar Rw 02 dengan kategori desa keterangan Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Selaganggeng Rw 01 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Keradenan Rw 03 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Mrebet, Desa Sangkanayu Rw 05 dengan kategori desa Gizi Buruk (Stunting);
- Kampung KB Kecamatan Karangmoncol, Desa Sirau Rw 04 dengan kategori desa tertinggal;
- Kampung KB kecamatan Karangjambu, Desa Jinkang Rw 02 dengan keterangan desa tertinggal.

SASARAN 3 :

TERTANGANINYA PERMASALAHAN PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam upaya untuk memenuhi dokumen perencanaan strategis perangkat daerah maka di susunlah pembandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun yang bersangkutan dalam bentuk table di bawah ini. Melalui urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sasaran strategis Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak Memiliki dua Indikator Kinerja yaitu :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
2. Nilai Kabupaten Layak Anak.

Tabel 3.6. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Target 2021
IDG	Persen	75.51	70.60	75.52	70.61	93.49	70.61

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indek Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2018 memiliki realisasi sebesar 75.51% dan pada tahun 2019 realisasi sebesar 75.51 % bila dibandingkan realisasi antara tahun 2018 dan 2019 Indek Pemberdayaan Gender (IDG) tidak mengalami perubahan realisasinya. Pada tahun 2020 target sebesar 75.52% namun realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 70.61 %.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu Belum adanya perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, belum optimalnya Pokja PUG Kabupaten dan vokal poin di 26 OPD dan 18 Kecamatan, belum tercapainya kuota perempuan di lembaga legislatif, belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG, masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, belum optimalnya pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan, belum semua Perangkat Daerah memiliki data pilah Gender dan anak

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai IDG di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya upaya untuk menekan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan realisasi kegiatannya antara lain:

- Spot iklan layanan masyarakat tentang kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di Radio Gema Soedirman Purbalingga sebanyak 36 kali dalam setahun.
- Membuat X Banner Anti Kekerasan untuk 18 kecamatan dan 2 buah untuk kantor.
- Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Komunitas dan Pembentukan UPT di 3 kecamatan yaitu Karanganyar, Kertanegara dan Karangmoncol.
- Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Sekolah yang dilaksanakan terhadap 100 siswa tiap sekolah dilaksanakan ke 10 sekolah yaitu MTs Ma'arif Rembang, SMA N 1 Rembang, SMP N 1 Karangmoncol, SMA Ma'arif Karangmoncol, SMP Muhammadiyah Kertanegara, SMA Muhammadiyah Kertanegara, SMP N I Karanganyar, SMA Ma'arif Karanganyar, SMA Muhammadiyah Bobotsari, SMP Muhammadiyah Bobotsari.
- Pelatihan Penanganan Kasus bagi Kader Tingkat Desa di 3 kecamatan yaitu Rembang, Karanganyar dan Karangmoncol dengan peserta 3 orang kader tiap desa.
- Rapat Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu HARAPAN sebanyak 2 kali dalam setahun.
- Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)
- Memberikan Pelayanan Pendampingan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 68 kasus.
- Mendistribusikan bantuan sembakau sebanyak 35 paket untuk korban kekerasan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

Kesulitan dalam memperoleh data korban dari masing-masing jejaring (Polres, RSUD, Kejaksaan, Pengadilan Negeri).

Solusinya adalah :

Meningkatkan koordinasi dengan anggota Tim yang dibentuk dengan SK Bupati Purbalingga.

Belum tersedianya rumah aman bagi korban dan petirahan bagi pelaku anak

Solusinya adalah :

Bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk menitipkan korban maupun pelaku.

b) Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUG dan PPRG

Peringatan Hari Kartini

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya peringatan Hari Kartini ke 141 tahun 2020 tingkat kabupaten purbalingga, namun karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga untuk pelaksanaan upacara hari kartini dilakukan lewat Virtual.

Peringatan Hari Ibu

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya peringatan Hari Ibu tanggal tahun 2020 tingkat kabupaten purbalingga, namun karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sehingga untuk pelaksanaan hari ibu juga dilakukan secara Virtual.

Permasalahan yang dihadapi :

Kurang berfungsinya pokja PUG dalam mensosialisasikan program yang responsif gender di masing –masing OPD.

Adanya wabah pandemi Covid - 19

Solusinya adalah :

Meningkatkan koordinasi dengan lintas OPD, mengadakan pelatihan/bintek tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Tetap menjaga Protokol Kesehatan dan berdoa semoga Wabah Covid – 19 segera hilang dari kabupaten purbalingga dan tahan air.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud cukup lengkap.

Tabel 3.7. Indikator Kinerja Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2019	Target 2021
Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	480	374.80	510	374.80	73.49	510

Nilai Kabupaten Layak Anak

Nilai Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten / Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak setiap kabupaten / kota berlomba lomba untuk mendapatkan predikat tersebut. Pada tahun 2018 Nilai kabupaten layak anak terrealisasi sebesar 480 dan pada tahun 2019 terrealisasi sebesar 374.8. Bila dibandingkan antara tahun 2018 dan tahun 2019 Nilai kabupaten layak anak mengalami penurunan sebesar 105.2. Pada tahun 2020 target nilai kabupaten layak anak mendapat 510, namun hanya terrealisasi sebesar 374.80, sehingga untuk kota Purbalingga belum dapat mendapatkan predikat Pratama.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yaitu belum terpenuhinya nilai indikator untuk mendapatkan Penghargaan Kota layak anak, belum terpenuhinya hak partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, kurangnya jumlah bermain ramah anak yang sesuai standar, belum tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan khusus untuk anak dilembaga pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), masih ditemukannya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, belum optimalnya pelayanan terhadap anak korban kekerasan, hal tersebut terjadi karena kurangnya SDM dan Pemahaman dari OPD di Kab. Purbalingga dalam

pembuatan PPRG dan ARG, sudah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan tetapi kurang tindak lanjutnya, Kurangnya Personil TIM HARAPAN di tingkat Kecamatan, kurangnya SDM tenaga penyedia data pilah gender di OPD, dukungan anggaran dari daerah masih rendah dan belum ada bantuan secara langsung, masih tahap sosialisasi dan pelatihan saja, sehingga untuk mendorong keberhasilan Tertanganinya Permasalahan Perempuan dan Anak dengan indikator sasaran yaitu: Nilai Kabupaten Layak Anak pada tahun 2020 memiliki beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut.

a) Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUHA

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya Rapat Gugus Tugas KLA yang diikuti oleh Tim Gugus Tugas yang berasal dari OPD se Kabupaten Purbalingga dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak, yang dimulai dari Pembentukan Desa / Kelurahan Layak Anak tahun 2020 sebanyak 38 Desa di 14 Kecamatan. Penyusunan Profil Anak, yang bertujuan untuk pemenuhan hak-hak anak..

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kurangnya koordinasi antar Tim Gugus Tugas dalam pelaksanaan kegiatan.
- Sulitnya mengumpulkan anak karena banyaknya waktu di sekolah yang terlalu padat.

Solusinya adalah :

- Meningkatkan koordinasi antar tim dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung KLA.
- Kurangnya dukungan data dari lintas OPD untuk pengisian kuesioner evaluasi KLA.
- Membagikan kuesioner lebih awal terkait KLA ke masing-masing OPD dan melakukan jemput bola dalam pengembalian kuesioner
- Terlaksananya kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Purbalingga .
- Mengadakan pertemuan Forum Anak di Tingkat Kabupaten Purbalingga.
- Mengadakan pertemuan pada waktu anak-anak tidak ada KBM dan pada waktu anak libur sekolah.

B. Realisasi Anggaran

Secara umum pengelolaan keuangan DINSOSDALDUKKBP3A pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasai belanja sebesar Rp. 10.891.567.934 atau sekitar 94.51 % dari target sebesar Rp. 11.524.143.000,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 632.575.066,-

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah		1.047.352.000	1.017.669.547	97.17
1	Penyediaan bahan dan jasa perkantoran	513.211.0000	485.405.501	94.58
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	93.018.000	92.879.702	99.85
3	Pemeliharaan sarana dan prasaran kantor	392.792.000	391.201.644	99.60
4	Pemeliharaan TMP	40.149.000	40.090.800	99.86
5	Pendidikan dan pelatihan pegawai	1.840.000	1.840.000	100
6	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja SKPD	6.342.000	6.251.900	98.58
PROGRAM FASILITASI, PENANGANAN DAN REHABILITASI KORBAN BENCANA		135.899.000	135.558.000	99.75
1	Penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial	135.889.000	135.558.000	99.75
PROGRAM PEMBERDAYAAN		1.737.844.000	1.349.681.500	77.66

KELUARGA				
1	Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi Remaja	30.980.000	30.934.000	99.85
2	Pembinaan, Pengembangan dan fasilitasi keluarga sejahtera	56.352.000	56.047.500	99.46
3	Penggerakan KKBPK di kampung KB (DAK Non Fisik)	1.650.512.000	1.262.700.000	96.18
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GANDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDIUNGAN ANAK		321.417.000	311.152.883	96.81
1	Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUG dan PPRG	122.765.000	122.573.499	99.84
2	Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi PUHA	98.062.000	96.422.000	98.33
3	Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.590.000	92.157.384	91.62
PROGRAM PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL		1.856.575.000	1.800.557.520	96.98
1	Fasilitasi Program Perlindungan Sosial	589.269.000	561.423.230	95.27
2	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggara Kesejahteraan sosial	787.513.000	783.015.443	99.43

3	Pembinaan dan Rehabilitasi PMKS	349.186.000	330.068.000	94.52
4	Oprasional Rumah Singgah	130.607.000	126.070.847	96.53
5	Pengadaan Peralatan Bantu Bagi Lanjut Usia (DAK)	0	0	0
6	Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data Sosial (DAK)	0	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN INSTITUSI KB	262.409.000	252.393.100	96.18
1	Pembinaan dan fasilitasi jaringan institusi KB	90.996.000	89.005.800	97.85
2	Pembinaan dan gasilitasi kelompok KB	36.228.000	29.398.000	81.15
3	Profil dan Analisis Data Kependudukan	20.418.000	20.318.000	99.51
4	Advokasi dan KIE	41.197.000	41.197.000	100
5	Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi KKBPK	33.225.000	33.224.300	100
6	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Penugasan)	40.375.000	39.250.000	97.21
	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.207.443.000	1.153.941.129	95.57
1	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial	221.620.000	195.571.932	88.25
2	Pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan	985.823.000	958.369.197	97.22
	Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan	4.955.204.000	4.870.593.455	98.29

Kepesertaan KB				
1	Penyediaan sarana dan prasarana KB (DAK)	1.331.753.000	1.318.417.500	99
2	Pembinaan Program KB Berbasis Masyarakat (DAK Non Fisik)	1.434.000.000	1.425.594.800	99.41
3	Pengadaan media KIE dan Management (DAK Non Fisik)	193.620.000	193.620.000	100
4	Peningkatan Pelayanan dan pembinaan peserta KB	35.103.000	24.949.400	71.07
5	Oprasional Balai Penyuluh (DAK Non Fisik)	1.861.776.000	1.828.185.155	98.20
6	Oprasional Distribusi Alokon (DAK Non Fisik)	98.952.000	79.826.600	80.67

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Melaksanakan 3 Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja Sasaran, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sasaran strategis meningkatnya partisipasi keluarga berencana dengan indikator kinerja TFR, pada tahun 2020 realisasi sebesar 2.05% dari target sebesar 2.5 % sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 100 %;
2. Sasaran strategis meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang terlayani, pada tahun 2020 realisasi sebesar 77.09 % dari target sebesar 70 %, sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 110.12 %.
3. Sasaran strategis tertanganinya permasalahan perempuan dan anak, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2020 realisasi sebesar 70.61 dari target sebesar 75.52, sehingga untuk capaian IDG pada tahun tersebut sebesar 93.49%.. Dan indikator kinerja Nilai Kota Layak Anak pada tahun 2020 realisasi sebesar 374.80, dari target yang ditetapkan sebesar 510, sehingga untuk capaian pada tahun tersebut sebesar 73.49%.

Secara Keseluruhan rata-rata capaian pelaksanaan kinerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 94.27 %,

Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh kualitas data dan analisa data yang lebih akurat serta melakukan konsultasi teknis dan asistensi kepada pihak yang berkompeten dalam penyusunan LKjIP.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, menetapkan target yang tepat dan menyesuaikan indikator pada setiap program dan kegiatan yang ada guna untuk mencapai sasaran strategis pada masing-masing urusan yang ada, sehingga dokumen yang disusun dapat digunakan, serta dapat mengurangi kesalahan/ keraguan dalam pelaksanaannya yang berpotensi mengurangi kualitas hasil pekerjaan.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara rutin sebagai alat kendali dan umpan balik pencapaian target kinerja.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, koordinasi dengan lintas sektoral;
5. Menurunkan jumlah PMKS melalui pemberian bantuan Sosial, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pendampingan bagi PMKS
6. Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kurang Mampu yang ada di kabupaten Purbalingga;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB melalui KIE, Pelayanan KB, Safari KB, dst;

8. Meningkatkan proporsi anggaran responsif gender melalui pelatihan PPRG, penyusunan GBS, penyusunan keijakan responsif gender;
9. Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui koordinasi lintas sector dan sosialisasi
10. Meningkatkan kualitas pelayanan korban kekerasan melalui penyediaan sarana prasarana, penyediaan SDM yang kompeten, KIE, pendampingan korban.